

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2001

ADRIAN MARTHEN LOTO
Nomor Stambuk : 45 99 021 060

Oleh :

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat - Syarat
Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Negara
Universitas "45"

SKRIPSI

BUSUWA



PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINASI
PENGAWASAN PEMBANGUNAN
DI KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45"

Makassar tersebut di bawah ini :

Nama : Adrian Marthen Loto
Nomor Stambuk : 45 99 021 060
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Judul : PELAKSANAAN FUNGSI KOORDINASI
PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI
KECAMATAN TANRALLI KABUPATEN
MAROS

Disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi setelah memenuhi segala

persyaratan yang telah ditentukan.

Menyetujui :

Pembimbing II

Drs. Syaamsul Bachri, M.Si

Pembimbing I

Prof. Dr. A.R. Paembonan, MS

Mengesahkan

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi

Makassar,

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS "45"

Drs. HUSAIN HAMKA, MS

Drs. MARTEN D. PALOBO

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Januari Tahun Dua Ribu Dua , Skripsi dengan judul Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Tanralilli Kabupaten Maros.

Nama : **ADRIAN MARTHEN LOTO**

NO. STB/NIRM : 4599021060

JURUSAN : ISIPOL

PROGRAM : ADMINISTRASI NEGARA

Telah diterima oleh panitia ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas "45" maka untuk memenuhi salah syarat guna menempuh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu administrasi program studi Ilmu Administrasi

Negara.



DR. ANDI JAYA SOSE, MBA
REKTOR UNIVERSITAS "45"

[Signature]

DRS. HUSAIN HAMKA, MS
DEKAN FISPOL UNIV. "45"

[Signature]

Pengawas Umum

Panitia Ujian



DRS. MARTEN D. PALOBO
SEKRETARIS

[Signature]

KETUA

DR. H. NURMI NONCI, Msi

[Signature]

Tim Penguji

1. DRS. HUSAIN HAMKA, MS
2. DRA. HJ. NURMI NONCI, Msi
3. DRA. JUHARNI, Msi
4. DRS. MARTEN D. PALOBO

(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)
(*[Signature]*)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih yang telah memberikan kasih dan karunia-Nya kepada penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dalam rangka memenuhi kewajiban dan sebagai syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan penulis menyangkut waktu, tenaga, terlelah kepada dana. Namun demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin agar dapat memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari segi materi maupun teknis.

Dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya atas semua bantuan nasehat, bimbingan dan jasa baiknya kepada :

1. Bapak Dr. Andi Jaya Sose, MBA Selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Drs. Husain Hamka, MS Selaku Dekan Fisipol Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Drs. Marten Dolo, P Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas ISIPOL Universitas "45" Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. AR. Paembonan, MS Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan dari awal penulisan skripsi hingga selesai.
5. Bapak Drs Syamsul Bachri, MSI Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan dari awal penulisan skripsi hingga selesai.
6. Ibu Dra. Nurmi Nonci, M.Si Selaku Dosen Pembimbing Akademis, yang senantiasa dengan sabar ikut memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Muhammad Ramli Selaku Kepala Tata Usaha beserta stafnya yang senantiasa dengan sabar ikut memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu aparat Kecamatan dan Desa-desa di seluruh Kecamatan Tarraalli Kabupaten Maros, terutama para

anggota masyarakat, Kepala Desa, dan Tokoh-tokoh Masyarakat yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan penulisan skripsi ini.

9. Para Dosen Universitas Timor-Timur yang turut membantu dan memberikan dorongan sehingga semuanya berjalan dengan baik.

10. Pada Orang Tua dan semua keluarga yang turut memberikan semangat dan doa restunya kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tak lupa dalam kesempatan ini penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulisan ini, baik secara penyusunan proposal, penelitian bahkan saat pada saat penyusunan laporan ada hal yang tidak berkenan di hati berbagai pihak. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Makassar, Januari 2002

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

i Halaman Judul

ii Halaman Pengesahan Pembimbing

iii Halaman Pengesahan Penguji

iv Kata Pengantar

vi Daftar Isi

viii Daftar Tabel

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah 4

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

D. Kerangka Konseptual 6

E. Metode Penelitian 10

F. Analisis Data

G. Sistematisa Penulisan 12

Bab II. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Koordinasi 14

B. Pengertian Pengawasan 16

C. Pengertian Pembangunan 27

76

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perubahan yang terus menerus berlangsung merupakan kemajuan dan perbaikan menuju tujuan yang ingin dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Garis - Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bahwa tujuan yang ingin dicapai sebagaimana yang telah ditetapkan GBHN tersebut adalah " Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikemanusiaan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta lingkungan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai ".

Pembangunan nasional dilaksanakan merata, bertahap dan menyeluruh untuk memacu peningkatan kemampuan nasional. Ini berarti pembangunan nasional yang menyeluruh sampai ke daerah-daerah merupakan bagian integral dan terpadu dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia.

PENDAHULUAN

BAB I

Sasaran pokok pembangunan nasional diarahkan pada kepentingan seluruh rakyat oleh karena itu seluruh bangsa Indonesia termasuk masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab atas suksesnya pembangunan tersebut. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang, sehingga kegiatan masyarakat dan pemerintah saling mengisi melengkapi sebagai satu kesatuan langkah menuju tercapainya pembangunan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur.

Pelaksanaan pembangunan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan bangsa yang kompleks tentunya sangat diharapkan adanya suatu sistem perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan secara efisien dan efektif. Jadi dalam pelaksanaan pembangunan yang mencakup seluruh aspek tak terkecuali pembangunan di bidang pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas aparat negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dalam membangun dan melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugas ini diperlukan adanya suatu sistem koordinasi pengawasan dan tujuan dapat teralisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Koordinasi pengawasan salah satu fungsi manajemen yang

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan. Selain dengan itu usaha untuk menunjang kelancaran dan suksesnya pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan potensi yang prioritas daerah yang diarahkan pada pembangunan dan menserasikan laju pertumbuhan antara sektor, antara daerah serta percepatan pembangunan Kawasan Indonesia Timur (KIT).

Mengacu pada latar belakang tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah koordinasi pengawasan dengan memfokuskan pada : perencanaan, pelaksanaan, peraturan, pelaporan, hasil pengawasan dan pertumusan saran dan tindakan korektif, selain itu penulis juga akan mengkaji faktor pendukung dan penghambat mekanisme koordinasi pengawasan pembangunan.

Selain itu pula penulis akan mengkaji sumber-sumber yang erat hubungannya dengan koordinasi pengawasan pembangunan yang ada di Kecamatan Tantalili Kabupaten Maros agar dapat bermakna bagi kehidupan masyarakat, karena diketahui bahwa tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan

latar belakang masalah ini kedalam suatu judul " Pelaksanaan Fungsi Koordinasi Pembangunan di Kecamatan Tanralli Kabupaten Maros ". Dengan suatu alasan bahwa, masalah koordinasi pengawasan pembangunan sangat perlu dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung guna pencapaiannya. Selain itu pula penulis dapat mengungkapakan hambatan yang dialami dalam pembangunan tersebut, serta dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah untuk menggerakkan roda pembangunan.

Jelas bahwa fungsi koordinasi pengawasan dimaksudkan sebagai usaha yang dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dari pada rencana, instruksi, sasaran dan sebagainya yang telah ditetapkan.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah.

Dengan melihat betapa kompleksnya pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dewasa ini, maka salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah diperlukan adanya suatu koordinasi pengawasan yang tepat, hal ini dimaksudkan agar supaya pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan program kerja yang ditetapkan sebelumnya.

Kecamatan Tanraalli Kabupaten Maros.

menghambat pelaksanaan fungsi koordinasi pengawasan di

c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan

pembangunan di Kecamatan Tanraalli Kabupaten Maros

b. Untuk mengetahui realisasi koordinasi pengawasan pelaksanaan

Maros.

pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tanraalli Kabupaten

a. Untuk mengetahui mekanisme koordinasi pengawasan

Adapun tujuan penelitian dari skripsi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

pembangunan di Kecamatan Tanraalli Kabupaten Maros ?

3. Faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan

Kecamatan Tanraalli Kabupaten Maros ?

2. Bagaimana realisasi koordinasi pengawasan pembangunan di

pembangunan di Kecamatan Tanraalli Kabupaten Maros ?

1. Bagaimana mekanisme koordinasi pengawasan dalam pelaksanaan

rumusan masalah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

rumusan masalah untuk menghindari kesimpangsiuran data. Adapun

Melihat kenyataan tersebut diatas, maka perlu adanya suatu

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil Penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi setiap instansi khusus pemerintah Kecamatan Tanralili untuk melaksanakan fungsi koordinasi pengawasan yang baik.

- b. Dapat berguna para akademis untuk menambah wawasan khususnya dalam hal pelaksanaan fungsi koordinasi pengawasan.

- c. Bagi mahasiswa dapat berguna mengetahui lebih jauh mengenai pembangunan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.

D. Kerangka Konseptual.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek merupakan tanggung jawab bersama yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan tersebut terarah dan berjalan sesuai dengan rencana adanya suatu koordinasi pengawasan.

Menyadari pentingnya fungsi pelaksanaan koordinasi pengawasan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan, baik dalam

Dari pengertian tersebut diatas, menggambarkan arti pentingnya koordinasi pengawasan dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan, maka fungsi koordinasi pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin agar semua kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana, peraturan, penunjukkan atau dengan prosedur atau mekanisme kerja yang ditetapkan. Melalui koordinasi pengawasan yang efektif diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan dan berjalan sesuai dengan rencana yang dapat membentuk dan

yang telah ditentukan sebelumnya.

Semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya bahwa : " Koordinasi pengawasan adalah proses pengamatan dari pada Sedangkan menurut S.P Siagian (1989:31) mengatakan

maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula ". sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan yang M.Manullang (1990:5) menyatakan bahwa : " Koordinasi

beberapa penjelasan tentang pengertian koordinasi pengawasan.

organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial, maka perlu diberikan

dilakukan oleh aparat pengawas. Berbagai usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam usaha untuk meningkatkan fungsi koordinasi pengawasan baik dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat rutin maupun dalam kegiatan pembangunan. Namun hasilnya masih belum sepenuhnya dapat dirasakan sebagai titik lemah dalam manajemen pemerintahan. Pada

b. Koordinasi pengawasan yang dilakukan secara fungsional yang baik ditingkat pusat maupun daerah.

a. Koordinasi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan langsung.

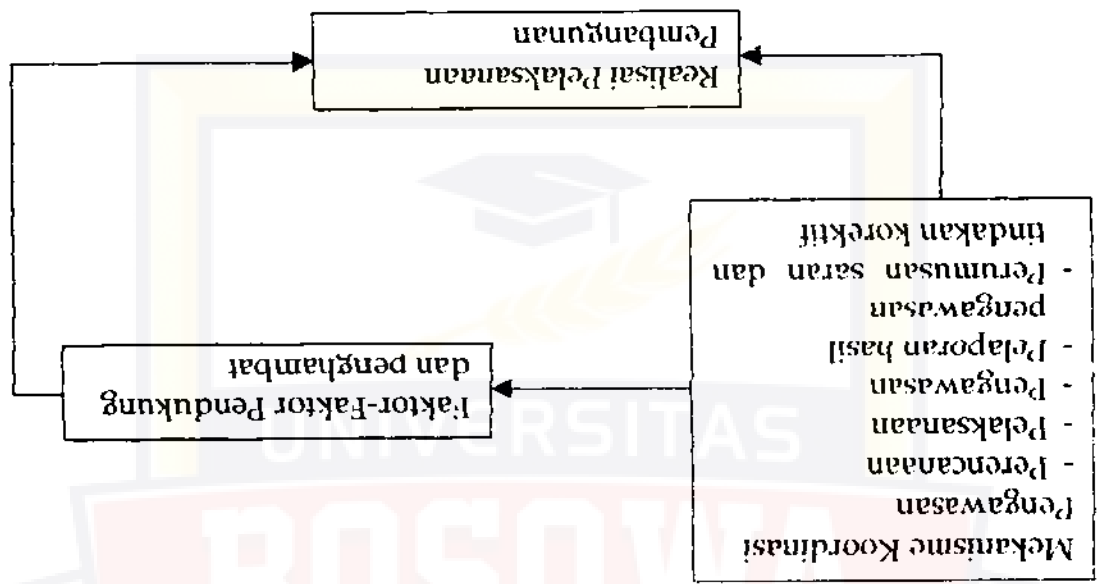
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 pasal 2 terdiri dari :

pemerintah sebagaimana yang dijelaskan dalam instruksi Presiden fungsi koordinasi pengawasan yang dimaksudkan oleh dan berlibawa.

demikian dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan yang bersih harus menjalankan fungsi koordinasi pengawasan ini sehingga dengan bagaimanapun sifatnya. Setiap pimpinan organisasi mau tidak mau pengawasan tidak dapat dihilangkan dalam sistem organisasi yang Sebagai salah satu fungsi dasar manajemen, koordinasi

masyarakat bangsa dan negara.

menciptakan pribadi-pribadi aparat yang bertanggung jawab kepada



Kerangka Konseptual :

Konseptual berikut ini :

Kecamatan Tanralli Kabupaten Maros dapat dilihat pada kerangka pelaksanaan fungsi koordinasi pengawasan pembangunan pada kantor Kabupaten Maros.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai fungsi koordinasi pengawasan pembangunan di Kecamatan Tanralli yang akan datang dan menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah saat tertentu perlu mendapat perhatian untuk penyempurnaan dimasa

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang masalah penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Tanralli Kabupaten Maros. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa pada kantor tersebut penulis akan mendapatkan data primer dan data sekunder tentang pelaksanaan fungsi koordinasi pengawasan pembangunan di Kecamatan Tanralli.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu jenis

pengumpulan data dengan cara mengumpulkan beberapa buku-

buku yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

- b. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dimana penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan cara melakukan :
- Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
 - Interview, yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung kepada responden.
 - Angket, yaitu penulis membuat daftar pertanyaan kemudian disebarkan kepada responden untuk diisi dan dikumpulkan untuk dianalisis.
4. Populasi dan Sampel
- a. Populasi penelitian ini adalah seluruh aparat pemerintah Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros sebanyak 46 orang.
- b. Sampel, dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan *Purposive sampling* dengan cara memilih responden yang dapat mewakili populasi. Adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
- Kepala Kecamatan 1 orang
 - Sekam 1 orang
 - Bidang Pembangunan 6 orang

Bab II. Tinjauan pustaka memuat tentang : Pengertian koordinasi , pengertian pengawasan, pengertian pembangunan, tujuan koordinasi pengawasan

Bab I. Pendahuluan yang memuat tentang : Latar Belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, metode penulisan serta sistematika penulisan.

maka penulis akan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :
 Untuk memudahkan pengenalan terhadap isi skripsi ini,

G. Sistematika Penulisan

yaitu : Deskriptif analisis.

Data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data penulis akan menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data

F. Analisis Data

- Bidang Administrasi	4 orang
- Bidang Pemerintahan	2 orang
- Lurah / Kepala Desa	6 orang
- Tokoh Masyarakat	2 orang
<hr/>	
Jumlah	22 orang

pembangunan dan fungsi koordinasi pengawasan

pembangunan.

Bab III. Gambaran Umum Lokasi Penelitian memuat tentang

; Kadaan Geografis, keadaan demografis, dan

struktur organisasi.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat tentang ;

Mekanisme koordinasi pengawasan pembangunan

Bab V. Penutup, memuat tentang ; Kesimpulan dan saran-

saran.



TINJAUAN PUSTAKA

BAB II

A. Pengertian Koordinasi

Dalam organisasi yang kompleks setiap bagian harus bekerja secara terkoordinir agar masing-masing mendapatkan hasil yang diharapkan. Hal itu sejalan apa yang dikatakan oleh Soewarno

Landayaningrat (191 : 23) sebagai berikut :

“ Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda, agar kegiatan dari bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara keseluruhan ”.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan di daerah

yang merupakan sasaran utama pelaksanaan pembangunan tersebut maka melalui koordinasi dapat diketahui arah dan tujuan pembangunan tersebut. dengan demikian bahwa dapat dikatakan koordinasi adalah faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di daerah. Selanjutnya Pringgodigdo dan Hasan Shadely mengatakan : “ Koordinasi sebagai usaha harmonisasi dan

sinkronisasi tingkatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Dalam

hal ini koordinasi berarti memancar seluruh tujuan organisasi ke dalam agar dengan mudah dapat mencapai tujuan keluar. Dari pendapat

Sedangkan menurut Kansil CST (1990:136) bahwa :
 “ Koordinasi adalah usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan

pengambilan tindakan dan lain sebagainya.

Koordinasi tindak lanjut sebagai indikasi bagaimana penerapan agar pelaksanaan pembangunan di daerah tidak terjadi penyimpangan, keterlambatan, ketidaksesuaian pelaksanaan dengan rencana, kurang efisien dan kurang efektif, kurang adanya kesesuaian

4. Koordinasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan

3. Koordinasi Pelaporan

2. Koordinasi Pelaksanaan

1. Koordinasi Perencanaan

berikut :

tersebut diatas dapat diketahui bahwa usaha harmonisasi dan koordinasi yang mutlak karena koordinasi dapat memecahkan pula konflik yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas menunjukkan bahwa berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh koordinasi. Koordinasi itu dapat dilakukan dalam tahap-tahap sebagai

yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk

mencapai tujuannya”.

Dari pengertian tersebut diatas dapat diketahui bahwa koordinasi sangat perlu dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil yang maksimal, begitupun dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan sangat penting untuk koordinasi antara personil yang

ada.

B. Pengertian Pengawasan

Dalam kehidupan sehari-hari kata pengawasan nampaknya telah menjadi bahasa pergaulan, sehingga bagi orang awam makna dari pengawasan itu, bukanlah suatu hal yang sulit dipahami. Bahkan bagi setiap orang begitu mendengar, membaca, dan melihat kata pengawasan telah dapat dipahami tentang apa yang dimaksud dengan pengawasan itu.

Namun sering menjadi pokok persoalan ialah untuk memberikan atau batasan tentang pengawasan ternyata tidaklah begitu mudah, bahkan para ahli khususnya berkecimpung dalam bidang manajemen administrasi rupanya tidaklah begitu mudah untuk memberikan definisi tentang pengawasan ini, terbukti dari banyaknya literatur yang menuat uraian tentang pengawasan itu

Dari pengertian tersebut diatas terungkap bahwa usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas merupakan pengertian pokok pengawasan. Untuk

rencana”.

korrektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan mengadakan evaluasi atasnya dan mengambil tindakan-tindakan “ Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai,

Menurut George R. Terry (1990:13) mengatakan bahwa :

beribawa.

pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan rangka meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam

terdapat perbedaan yang prinsipal.

rumusan yang bervariasi meskipun inti pokoknya pada umumnya tidak oleh para ahli dalam bidang administrasi itu ternyata dapat dijumpai Sekalipun defenisi atau pengertian yang telah dikemukakan

defenisi tentang pengawasan.

mencoba mencurahkan tenaga dan pikirannya dalam memberikan sendiri. Namun dilain pihak telah cukup banyak ahli yang telah

menilai kenyataan yang sebenarnya harus ada standar, adapun standar

dari pengawasan adalah sebagai berikut :

1. Rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang ingin dicapai. Dalam hal proyek pembangunan standar ini berupa DIP (Daftar Isian Proyek) atau Djpda (Daftar Isian Proyek Daerah) untuk proyek-proyek daerah otonom, petunjuk Operasional (PO), Kontrak pemborongan pekerjaan atau Surat Perintah Kerja (SPK) serta Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Kerja (RKS)

2. Ketentuan perundang-undangan yang menyangkut objek yang diawasi. Untuk bidang pembangunan ketentuan umum yang paling pokok dan berlaku saat ini adalah Keputusan Presiden No. 29 tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3. Segi daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pekerjaan hal ini sangat penting untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kebobrokan atau pemborosan serta manipulasi dalam pembangunan untuk penggunaan dan penyimpanan - penyimpanan.

Dengan adanya standar tersebut diatas, maka seseorang

pimpinan atau manajer dengan mudah mengetahui pelaksanaan tugas para pelaksana dan juga terhadap system yang berlaku dalam organisasi, sehingga bila terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam

senantiasa dilakukan oleh pimpinan disertai bawahan terhadap

c. Harus mempunyai jiwa kedisiplinan, yaitu suatu pencerangan yang budaya bangsa.

moral maupun sikap mental sesuai dengan sifat dan perilaku bawahan dan masyarakat secara umum dalam hal integritas, baik

b. Harus mempunyai ketauladan untuk memberi contoh kepada inisiatif dan jiwa motivasi yang penuh dedikasi dan prakarsa.

betul dapat diandalkan dengan kata lain harus mempunyai sifat

a. Manusia hendaknya mempunyai jiwa kepemimpinan yang betul- sebagai subyek atau pelaksana dari pengawasan hendaknya :

Bertitik tolak dari penjelasan tersebut diatas, maka manusia pemerintah secara keseluruhan.

tidak lanjut pengawasan akan dapat pula menurunkan wibawa perhatian sewajarnya terhadap hal tersebut. Pengabaian terhadap pengawasan, oleh karena itu hendaknya setiap pimpinan menaruh terutama melalui tindakan-tindakan korektif sebagai perwujudan dari Prestasi dan citra pengawasan dapat dilihat oleh masyarakat

berjalan kembali sesuai dengan rencana semula.

maksud untuk menjamin agar seluruh sistem yang telah ditetapkan pelaksanaan maka tindakan korektif seketika dapat diambil. Dengan

pelaksanaan peraturan-peraturan, baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

d. Harus mempunyai prestasi yaitu suatu nilai pekerjaan atau hasil dari kegiatan yang telah dilakukan. Demikian pula penilaian istimewa yang telah dicapai seorang petugas pengawasan baik kegiatan itu terprogram maupun tidak terprogram.

e. Harus mempunyai dedikasi, yaitu suatu hal atau kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan kedisiplinan yaitu dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa mengetahui secara pasti dan menyadari sedalam-dalamnya akan pentingnya peranan dan tugas yang dibebankan kepadanya dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

f. Harus mempunyai sifat ketebukan, luwes dan keberanian bertindak dimana sikap yang seharusnya dimiliki aparat yang ditunjuk sebagai untuk senantiasa mengungkapkkan apa yang seharusnya dan bagaimana kegiatannya, bijaksana serta jiwa tanggung jawab yang tinggi.

Sebagai pengawas harus mengetahui sejauh mana pekerjaan yang telah dilaksanakan, apakah ada kemajuan atau tidak dan bagaimana hasil yang telah dicapai. Bila tidak ada kemajuan dan hasil

.. Pengawasan adalah terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan
Selanjutnya Soejatmo (1998 : 49) mengatakan bahwa :

obyek pengawasan.
dan perangsang untuk melakukan penyempurnaan terhadap kondisi
mengurangi meniadakan penyimpangan disamping menjadi pendorong
dinamis yaitu dapat menimbulkan kegiatan untuk memperbaiki,
kesalahan. Tindakan yang dilakukan haruslah bersifat mendidik dan
yang ada dan pengambilan tindakan harus sesuai dengan bobot
didasarkan atas pemikiran yang logis dan didukung dengan fakta-fakta
bertindak emosional, tetapi harus rasional. Tindakan rasional harus
terhadap kesalahan yang dilakukan oleh bawahan, yakni janganlah
Suatu hal yang harus diingat dalam mengambil tindakan
penyelewengan yang berkelanjutan.

semestinya dan juga mencegah timbulnya penyimpangan dan
menjamin agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan
cari kesalahan, melainkan pengawasan yaitu dilakukan untuk
diperhatikan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan untuk mencari
harus di cari faktor-faktor penyebabnya. Akan tetapi yang perlu
yang dicapai tidak sesuai dengan ketentuan yang semestinya, maka

instruksi yang telah diberikan dengan prinsip-prinsip yang telah

digarisakan.

Dari pengertian diatas menunjukkan pengawasan yang

dilakukan bersifat pengujian apakah segala sesuatu yang sedang

dilaksanakan itu telah sesuai dengan rencana. Jadi dalam hal ini

pengawasan dilakukan pada waktu pekerjaan yang sedang

berlangsung, hal ini dilaksanakan itu telah sesuai dengan rencana. Jadi

dalam hal ini pengawasan dilakukan pada waktu pekerjaan

berlangsung, hal ini dimaksudkan bahwa bila terjadi suatu kesalahan

atau penyimpangan segera dapat diketahui dan diadakan perbaikan

agar kesalahan yang terjadi tidak berlanjut terus menerus.

Keberhasilan sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip dasar

yang ada dalam pengawasan, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai

berikut :

a. Adanya rencana tertentu dalam pengawasan, sebab dengan adanya

rencana yang matang akan merupakan standar atau alat pengukur

terhadap berhasil tidaknya suatu pengawasan.

b. Adanya pemberian instruksi atau perintah dalam pengawasan.

c. Dapat merefleksikan sebagai sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang

diawasi, keuangan dan sebagainya memerlukan sistem pengawasan.

d. Dapat segera dilaporkan adanya berbagai bentuk kesalahan dan

penyimpangan.

e. Pengawasan harus bersifat fleksibel, dinamis dan ekonomis.

f. Dapat merefleksikan pola organisasi.

Selain prinsip-prinsip pengawasan hal lain yang perlu

diperhatikan dalam pengawasan adalah metode pengawasan, seperti

yang dikemukakan oleh Suwarno handayaniingrat (1981:21) bahwa

metode pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan langsung : yaitu apabila pimpinan organisasi

pengawasan melakukan pemeriksaan langsung pada tempat

pelaksanaan pekerjaan baik berupa inspeksi, pengusutan dan

pemeriksaan, dimaksudkan agar supaya dilakukan tindakan

perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan.

b. Pengawasan tidak langsung apabila para aparat pengawasan

organisasi melakukan pemeriksaan pekerjaan hanya melalui laporan

yang masuk padanya.

c. Pengawasan formal, ialah pengawasan yang secara formal

dilakukan oleh aparat pengawasan yang bertindak atas nama

pimpinan organisasinya atau atasan dari pada organisasi itu.

Pada kegiatan pengawasan dilakukan pencatatan mengenai kenyataan pelaksanaan dilapangan, pencatatan tersebut sedapat mungkin dapat memperlihatkan apakah keadaan, apakah proyek tersebut dapat diselesaikan menurut jadwal yang telah dikatakan. Penundaan suatu proyek mungkin saja terjadi apabila sumber-sumber

penyelenggaraan secara berdaya dan berhasil guna".
 pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menjamin kelancaran untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggara tugas pengawasan sangat penting, karena pengawasan itu adalah suatu usaha setiap organisasi terutama dalam organisasi pemerintah, fungsi mengungkapkan bahwa : " Pengawasan secara umum yaitu dalam

Dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1999

bersifat fisik, misalnya pemeriksaan terhadap gedung.

f. Pengawasan teknis, yaitu pengawasan terhadap hal-hal yang kepegawaian dan materi.

e. Pengawasan administrasi ialah pengawasan di bidang keuangan,

kunjungan yang tidak resmi.

saluran formal atau prosedur yang telah dipimpin dengan melalui

d. Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui

yang diperlukan sangat terbatas persediaannya atau persediaan sama

sekali tidak ada.

Pengawasan sangat diperlukan dalam organisasi pemerintah

dan pembangunan, pengawasan dilakukan oleh pimpinan organisasi

itu sendiri dan juga oleh badan khusus yang dibentuk untuk membantu

pimpinan atau manajer. Untuk lebih jelasnya sesuai dengan instruksi

Presiden Nomor 15 tahun 1983 tanggal 4 Oktober 1983 menyatakan

sebagai berikut :

a. Pengawasan terdiri dari :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan langsung baik di

tingkat pusat maupun ditingkat daerah.

2. pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat

pengawasan.

b. Ruang lingkup Pengawasan

1. Kegiatan Umum Pemerintah

2. Pelaksanaan rencana pembangunan

3. Penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan

kekayaan negara.

4. Kegiatan badan usaha milik negara dan badan usaha milik

daerah.

mendapatkan teman yang bersifat negatif. pengawasan. Tindakan ini dilakukan bila dalam pengawasan tersebut dikenal sebagai tindakan korektif atau tindak lanjut oleh manajer, sehingga dapat melahirkan tindakan nyata. Tindakan terlihat atau dirasakan apabila data dan informasi itu dimanfaatkan informasi, maka hasil akhir atau manfaat dari pengawasan hanya akan Produk langsung dari pengawasan hanyalah berupa data dan

4. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tindak lanjut pengawasan.

tepat bagi aparat pengawasan fungsional pemerintah.

3. Menentukan sasaran prioritas dan ruang lingkup pengawasan yang

pengawasan meletak.

2. Meningkatkan kemampuan aparat pengawasan fungsional dan

khususnya.

kalangan masyarakat umumnya dan semua aparat pemerintah

1. Menyebarkan pengertian dan kesadaran pengawasan kesemua

guna pengawasan, maka dapat dilakukan dengan jalan :

Dalam rangka meningkatkan peningkatan daya guna dan hasil

kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

5. Kegiatan aparat pemerintah yang mencakup

Upaya untuk meningkatkan tindak lanjut pengawasan dapat

dilakukan dengan :

- a. Membina aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa maka atasan yang berwenang berkewajiban untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mengadakan tindak lanjut secara terkoordinasi atas hasil aparat-aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan alas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pengusutan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan terhadap seorang pejabat, pegawai atau karyawan pemerintah yang diduga melakukan tindakan penyelewengan atau korupsi tidak menghalangi atau mengurangi kewajiban atasan yang berwenang untuk mengambil tindakan administratif sesuai ketentuan berlaku yakni Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980

C. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses yang secara terus menerus dilakukan dengan berencana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut Sondang P. Siagian (1994:83) mengemukakan

bahwa :

“ Pembangunan adalah suatu atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernisasi dalam rangka pembinaan bangsa ”.

Apabila pendapat tersebut dianalisis lebih lanjut akan terlihat ide pokok yang sangat penting untuk diperhatikan apabila seseorang berbicara tentang pembangunan. Ide-ide pokok tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pembangunan merupakan proses, dimana proses berarti suatu kegiatan yang secara khusus terus menerus di laksanakan, meskipun sudah barang tentu proses itu dapat dibagi menjadi beberapa tahap tertentu yang berdiri sendiri.

2. Bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilakukan, maka jika ada kegiatan tertentu yang nampak kelihatan seperti pembangunan akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental di masyarakat, tidak dapat digolongkan terhadap kategori pembangunan.

3. Bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.

4. Bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dimana lebih baik dari

Dari pendapat tersebut diatas dapat diperoleh gambaran bahwa dengan adanya proses pembangunan yang dilakukan secara sadar, maka akan terjadi pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus, untuk mencapai keadaan yang lebih baik dari sekarang perlu

“ Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik ”.

Bintoro Tjokroamidjono (1992:42) mengatakan bahwa

ditentukan sebelumnya.

6. Bahwa semua hal yang telah disebutkan diatas ditunjukkan kepada usaha membina bangsa yang terus menerus harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah administratif.

5. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi dimensional, maksudnya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek sosial, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional serta swasembada dan mengurangi ketergantungan kepada pihak lain.

pada sebelumnya serta kemampuan untuk menguasai alam lingkungan dalam rangka usaha peningkatan kemampuan

partisipasi pembangunan perlu dikembangkan masyarakat terutama pengarahannya mengenai tujuan pembangunan tersebut. Dalam tujuan itu pada umumnya pemerintah perlu memberikan tujuan-tujuan terutama cara-cara dalam merencanakan pencapaian 2. Meningkatkan artkulasi atau kemampuan untuk memunuskan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat. Dalam masyarakat demokratis arah dan tujuan strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh proses politik dalam suatu negara turut menentukan arah, 1. Terlibat dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme partisipasi pembangunan yaitu :

Disini akan dikemukakan empat aspek penting dalam rangka dalam proses pembangunan. masyarakat luas sesuai dengan arah kebijaksanaan yang ditetapkan tersebut. Administrasi pembangunan juga berperan untuk melibatkan kerja sama bagi seluruh masyarakat dalam proses pembangunan pemerintahan, tetapi hendaknya juga dapat menimbulkan respon dana kegiatan-kegiatan yang nyata dan efektif dalam pelaksanaan diprinci dalam rencana - rencana dan diterjemahkannya dalam menetapkan strategi pembangunan yang lebih baik, kemudian

organisasi masyarakat sendiri untuk mendukung proses pembangunan.

3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatannya yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses pembangunan. Dalam hal ini tergantung dari sistem dan tata cara penyelenggaraan pemerintah yang berlaku bagi suatu negara.

4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program yang partisipatif dalam pembangunan berencana. Program ini pada suatu tingkat tertentu memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam rencana yang menyangkut kesejahteraan mereka, dan juga secara langsung melaksanakan sendiri serta memetik hasil dari program itu.

Pelaksanaan pembangunan disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional, juga sekaligus harus menjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh rakyat sesuai dengan rasa keadilan. Dalam rangka mewujudkan rasa keadilan sosial, hendaknya di satu pihak pembangunan tersebut ditujukan untuk meningkatkan produksi saja, melainkan sekaligus mencegah melebarinya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dengan menumbuhkan pola hidup sederhana dan wajar sehingga tujuan akhir dari pembangunan

itu bukan saja menciptakan masyarakat yang adil dan makmur saja

tetapi juga menjaga kesenjangan sosial.

Dilain pihak partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat

dalam pembangunan harus semakin luas dan merata baik dalam
memikul bahan pembangunan maupun dalam pertanggungjawaban
atas pelaksanaan pembangunan ataupun dalam menerima kembali hasil
pembangunan, untuk itu perlu diciptakan pembangunan demi

terwujudnya kreatifitas dan aktivitas dikalangan masyarakat.

Dengan demikian upaya pemerintah untuk meningkatkan

partisipasi dari segenap lapisan masyarakat dalam rangka kelancaran
pembangunan yang merupakan tindak lanjut untuk mempercepat

pelaksanaan pembangunan dari sudut pandang pembangunan, maka

kemampuan pemerintah relatif sama, jelas bahwa ada suatu pemerintah

yang harus memikul langgung jawab berat sehingga banyak usaha yang

dikerjakannya gagal dalam pelaksanaannya.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses yang

melibatkan pengarah nasional dan percepatan untuk melakukan

perbuatan dalam mencapai sasaran-sasaran tertentu termasuk

didalamnya sejumlah keputusan dalam usaha-usaha untuk

melaksanakannya. Hasil dari usaha itu adalah merupakan umpan balik

berwujud informasi baru yang menunjukkan tafsiran kesalahan-kejadian-kejadian baru yang tidak diharapkan dan kemungkinan-kemungkinan baru yang merupakan dalam bentuk pengambilan keputusan. Dari hasil tersebut kemudian dianalisis dengan konsekwensi atau melakukan upaya baru untuk melaksanakan pembangunan selanjutnya.

Dalam melaksanakan usaha pembangunan tentu menghendaki adanya kebijaksanaan dan program-program pembangunan yang lebih baik. Berbagai pelaksanaan program dalam rangka mencapai sasaran pembangunan merupakan kegiatan yang bersifat antar sektor atau antar lembaga, seringkali hambatan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam program pembangunan disebabkan karena kurangnya koordinasi. Oleh karena itu koordinasi harus lebih dahulu disusahakan pada tingkat perencanaan dalam setiap program atau antar sektor. Dalam tingkat ini perlu diperhatikan pembagian tugas departemen atau lembaga. Dengan demikian badan atau lembaga pemerintah yang akan terlibat dalam pelaksanaan program dalam suatu sektor atau luar sektor mengetahui secara jelas wilayah dan ruang lingkup pekerjaannya. Keterlibatan antar lembaga

dalam suatu program yang telah ditetapkan akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan.

D. Tujuan Koordinasi Pengawasan Pembangunan.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan koordinasi pengawasan untuk mendukung kelancaran dan ketetapan pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan. Koordinasi pengawasan yang dilakukan adalah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi dapat disimpulkan tujuan koordinasi untuk menjamin dan mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan pelaksanaan pembangunan, sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk lebih jelasnya tujuan Koordinasi pengawasan pembangunan dapat terinci sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.

2. Untuk mengetahui apakah sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah ditetapkan.

3. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, serta

kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan.

4. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan secara efisien.

5. Untuk mencari jalan keluar bila ternyata dijumpai kesulitan-

kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah

perbaikan.

Dengan memperhatikan tujuan koordinasi pengawasan

pembangunan tersebut diatas, maka seharusnya dalam setiap

pembangunan yang dilaksanakan harus ada unsur-unsur pengawasan

didalamnya dengan adanya koordinasi pengawasan kita akan

mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pengawasan

pembangunan. Untuk mendapatkan informasi dan data yang riil,

scoring pengawas harus mendatangi objek yang diawasi secara

langsung dilapangan, sehingga bila terjadi suatu kesalahan - kesalahan

atau kekeliruan-kekeliruan dapat diketahui secara langsung dan

tindakan berupa perbaikan dapat dilakukan seketika, selain itu juga

dapat meningkatkan disiplin kerja pelaksana pembangunan.

E. Fungsi Koordinasi Pengawasan Pembangunan.

Sebelum mengetahui fungsi-fungsi koordinasi pengawasan

pembangunan maka terlebih dahulu harus diketahui sasaran-sasaran

- harus dicapai dalam melakukan koordinasi pengawasan. Adapun sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut :
1. Strategi, yaitu mengamankan semua jalur pelaksanaan Panca krida Kabinet Pembangunan IV.
 2. Teknis, yaitu mampu menjamin dipatuhinya peraturan perundang-undangan serta kebijaksanaan dan mencegah atau menemukan penyimpangan pelaksanaan di 33 jalur dalam GBHN.
 3. Idil, yaitu semua faktor tingkat dan jalur kegiatan harus dijangkau oleh aparat koordinasi pengawasan fungsional.
 4. Produktif dan efektif, yaitu diberikan adanya koordinator dalam pemilihan sasaran dengan jalan :
 - a. Penentuan Prioritas
 - b. Meningkatkan volume dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya.
- Melihat sasaran dan tujuan koordinasi pengawasan diatas, maka koordinasi pengawasan mempunyai beberapa fungsi yaitu :
1. Dengan terjadinya berbagai penyimpangan atau kesalahan-kesalahan artinya pengawasan yang baik adalah suatu pengawasan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan, kesalahan ataupun penyelewengan.

2. Untuk mengetahui dan memperbaiki segala penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, arti bahwa dengan adanya koordinasi pengawasan haruslah dapat diusahakan cara-cara tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, agar tidak berturut-turut dan dapat mengakibatkan kerugian organisasi.
3. Untuk mendinamisir organisasi atau perusahaan serta segenap kegiatan manajemen lainnya, yakni dengan koordinasi pengawasan diharapkan sedini mungkin dapat dicegah terjadinya penyimpangan sehingga setiap bagian yang ada dalam organisasi selalu dalam keadaan siap.
4. Untuk memperbaiki rasa tanggung jawab, adanya koordinasi pengawasan rutin mengakibatkan setiap bagian berikut karyawannya akan selalu bertanggung jawab terhadap semua tugas yang dilakukan. Sehingga dengan demikian akan tercipta suatu efisiensi tugas dengan baik.

berikut ini :

mengetahui luas wilayah Kecamatan Tanralili dapat dilihat pada tabel Dengan ibukota Propinsi 30 km. Dan desa sejauh 30 Km. Untuk pemerintahan wilayah Kecamatan dengan ibukota Kabupaten 7,5 Km. 34846 Ha meliputi kelurahan persiapan dan 13 desa. Jarak pusat luas wilayah Kecamatan Tanralili adalah 348,46 Km atau

- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Mandai.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah Utara dengan Kecamatan Bantirumun dan Maros Baru

dengan memiliki batas wilayah sebagai berikut :

daerah yang terdiri dari tanah datar, dan daratan tinggi berbukit-bukit Tingkat II Se Sulawesi Selatan. Secara geografis daerah ini memiliki Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Kecamatan yang ada di Kabupaten Maros dibentuk berdasarkan Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros adalah salah satu

A. Letak Geografi

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

BAB III

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan Tanrauli Diperinci Menurut Desa Tahun 2000.

Desa / Kelurahan	Luas / Dusun	Luas KM ²	Luas Ha
Allaere	4	3,12	312
Damai	4	9,11	911
Toodopuha	4	13,93	1393
Lekepancing	4	9,93	993
To dollimae	5	32,76	3276
Purkanaria	3	4,63	463
Kurusumange	3	10,15	1015
Sudirman	3	2,71	271
Puncak	4	30,73	3073
Benteng Cahah	3	86,30	8630
Tompopulu	3	60,92	6092
Bontomanai	3	52,12	5212
Bontosuma	4	32,06	3206
Jumlah	51	348,46	348846

Sumber : Kecamatan Tanrauli Tahun 2000

Kecamatan Kanrauli memiliki iklim sedang, suhu maksimum mencapai 32° c dan suhu minimumnya dapat mencapai 18°c. keadaan curah hujannya dari tahun 1995 sampai tahun 2000 sangat bervariasi. Curah hujan terendah berada pada bulan September yakni sebanyak 18 mm dengan 4 hari hujan.

Debit curah hujan tertinggi berada pada tahun 2000 mencapai

3872 mm pertahun atau rata-rata 322,7 mm perbulan, sedangkan terendah terjadi pada tahun 1995 hanya mencapai 2349 mm pertahun. Sedangkan hujan tertinggi terjadi pada tahun 2000 yakni sebanyak 157 hari hujan dan terendah terjadi pada tahun 2000 yakni hanya mencapai

107 hari.

Secara topografis bentuk permukiman wilayah Kecamatan

Tanralli bervariasi yakni 68% wilayahnya datar hingga berombak selebihnya 22 % adalah daerah berombak hingga berbukit dan 10% berbukit hingga bergunung.

Dengan potensi lahan yang cukup subur, maka wilayah Kecamatan Tanralli ditumbuhi bermacam-macam tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomi cukup tinggi. Tumbuhan yang merupakan potensi alam Kecamatan Tanralli dan sebagai komoditi adalah bambu dan rotan. Sedangkan sumber daya alam lain belum dikelola dan merupakan potensi wilayah adalah adanya emas dan batu bara yang dikandung oleh Desa Tompoblu.

B. Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Tanralli menurut data tahun

2000 sebanyak 42.453 jiwa dengan pertumbuhan sebanyak 5304 jiwa

Aspek pembangunan merupakan aspek yang sangat menentukan tinggi rendahnya pendapatan masyarakat, kegiatan perekonomian penduduk Kecamatan Tanralili masih bergerak di sektor pertanian sehingga produksi pertanian mengalami peningkatan dalam jumlah kecil. Sedangkan sektor industri terutama industri kecil dan rumah tangga mengalami peningkatan yang sangat pesat, begitu juga sektor perdagangan dan jasa untuk mendukung proses aliran barang terutama ke luar wilayah Kecamatan. Dengan sektor ekonomi yang

perimbangan sebanyak 239 jiwa, sedang selebihnya pada sektor jasa. jiwa, sektor perdagangan 1641 jiwa, industri dan pertukangan serta pencaharian masih didominasi oleh sektor pertanian sebanyak 18274 Penduduk Kecamatan Tanralili yang mempunyai mata

Sumber : Kantor Kecamatan Tanralili Tahun 2000

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	26.446
2.	Perempuan	26.007
		42.453

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2000.

ini :
setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

belum ikut kuat ini menyebabkan masyarakat hidup dalam keterbelakangan dan kemiskinan.

C. Struktur Organisasi

Mengetahui secara mendalam suatu organisasi tidak hanya mengenal prinsipnya ataupun cirinya saja tetapi lebih penting dan juga sekaligus pemahaman kita terhadap organisasi yang bersangkutan secara lebih luas dan mengenal struktur organisasinya, karena dengan demikian dapat diketahui sejauh mana peranan dan hubungan satuan-satuan yang ada dalam organisasi atau dapat dianggap sebagai kerangka dasar yang menyeluruh yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu organisasi dan menetapkan hubungan - hubungan definitif antara personil yang melaksanakan fungsi tersebut.

Pada hakikatnya struktur organisasi merupakan suatu jalinan kerja sama, semakin besar suatu organisasi semakin kompleks pula hal-hal yang dihadapi dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga merupakan suatu keharusan untuk membuat struktur organisasi yang tersusun rapi dan teratur.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, menunjukkan bahwa struktur organisasi adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan dimana di dalam struktur tersebut jelas menunjukkan pembagian tugas

disusun menurut undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pokok-Pemerintah tingkat Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros

Kecamatan Tanralili.

dacrah otonom serta pemerintahan desa yang berada di wilayah lembaga vertikal tingkat Kecamatan maupun lembaga pemerintahan meliputi organisasi pemerintahan wilayah Kecamatan Tanralili dan Organisasi pelaksana pembangunan di Kecamatan Tanralili

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan.

tugas yang akan dilaksanakan dan dianggap perlu diadakan perubahan sehingga dengan demikian dapat disesuaikan dengan luasnya tugas-fleksibel yang dalam polanya telah dipertimbangkan dengan seksama Struktur organisasi ini disusun dalam bentuk sederhana dan

mencapai tujuan kantor.

mudah mengadakan pengawasan secara efektif dan efisien dalam jawab serta tata kerja sedemikian rupa sehingga pimpinan (camat) Kabupaten Maros dimana menunjukkan wewenang dan tanggung Begitu pula struktur organisasi Kecamatan Tanralili

sebagaimana mestinya.

secara jelas menurut bagian-bagiannya, sehingga dalam menjalankan tugas sehari-hari pegawai tidak kaku dan pelaksanaan tugas berjalan

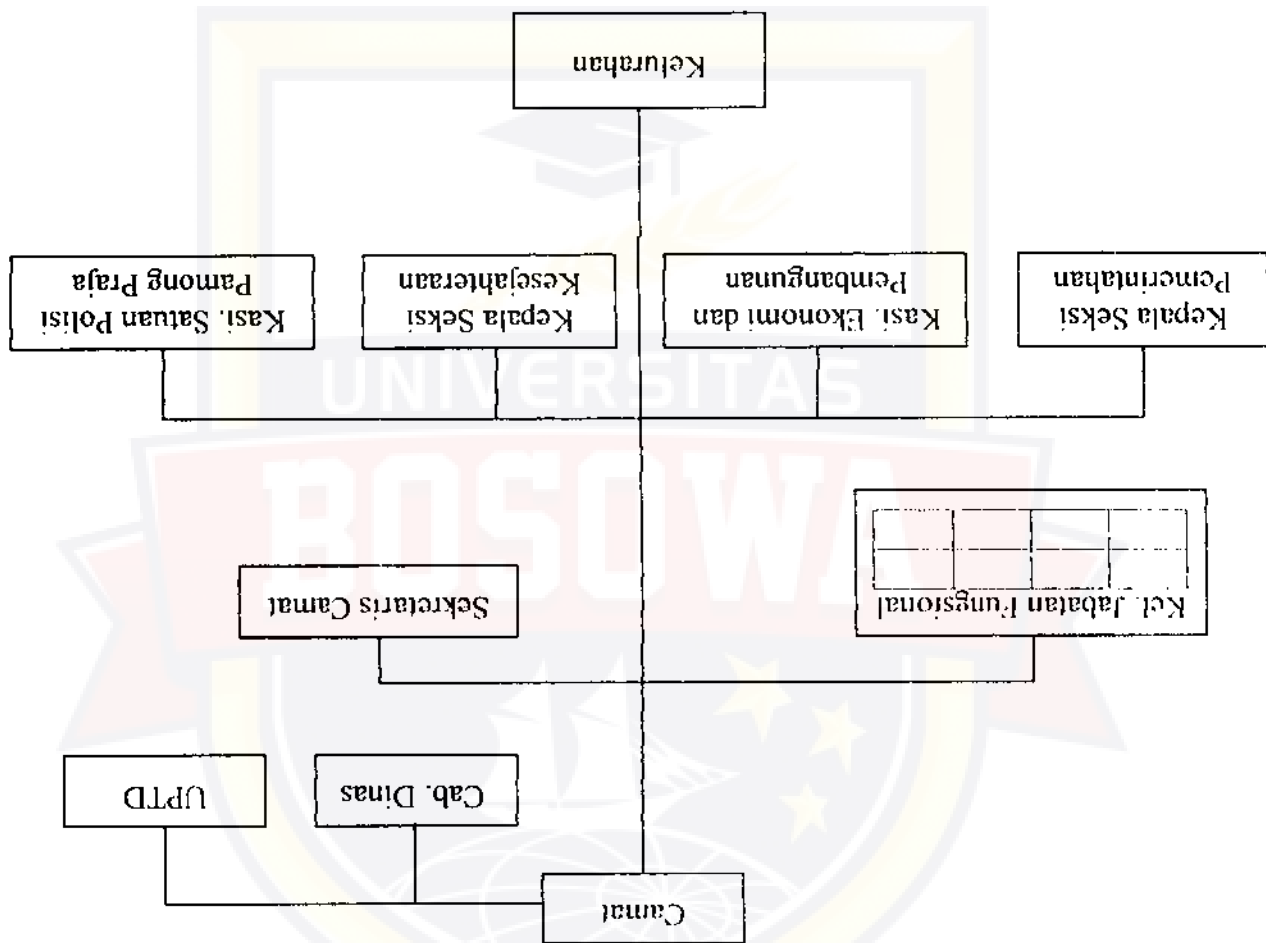
pokok Pemerintahan di Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri

No. 81 tahun 1984 tentang struktur dan organisasi pemerintah wilayah

Kecamatan.

Untuk mengetahui struktur organisasi Kecamatan Tanralilli

dapat dilihat pad bagan berikut ini :



Sumber : Kantor Kecamatan Tanralilli Tahun 2000

Koordinasi pengawasan merupakan penilaian dari pelaksanaan suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan sampai kegiatan

pelaporan hasil, perumusan saran dan pengambilan tindakan korektif. tindakan yang hakikatnya meliputi : Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang dimaksudkan adalah terdiri dari serangkaian tindakan patokan dalam pengambilan kebijaksanaan. Mekanisme pedoman umum koordinasi pengawasan pemerintah yang kemudian Mekanisme koordinasi pengawasan merupakan penjabaran diperoleh dayaguna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

satuan pengawasan dalam lingkungan instansi pemerintah sehingga kebijaksanaan dan pelaksanaan koordinasi pengawasan bagi seluruh pengawasan yang dapat dijadikan patokan dalam pengambilan pengawasan agar tercipta keseragaman dalam pelaksanaan koordinasi Maros telah dibuat pedoman untuk pelaksanaan koordinasi pengawasan dalam pembangunan di Kecamatan Tanralli Kabupaten Pada dasarnya prinsip-prinsip dan mekanisme koordinasi

A. Mekanisme Koordinasi Pengawasan Pembangunan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV

tersebut rampung, agar pelaksanaan proyek pembangunan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan, maka pada saat pelaksanaannya perlu diadakan koordinasi pengawasan secara intensif dan aktif.

Pelaksanaan koordinasi pengawasan terhadap proyek pembangunan di Kecamatan Tamalili Kabupaten Maros adalah koordinasi pengawasan langsung dan tidak langsung dengan asumsi bahwa kesalahan atau kekhilafan yang ditemukan di lapangan dapat diperbaiki dalam hal ini bagaimana sehingga kesalahan dan kekhilafan tersebut tidak terulang lagi. Untuk itu perlu diperhatikan dalam hal ini bagaimana meningkatkan pelaksanaan tugas fungsi aparat pengawasan sehingga sasaran yang telah digartiskan dalam perencanaan dapat tercapai.

Inspektorat wilayah kabupaten Maros sebagai unsur pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional diharapkan dapat melaksanakan pemerintahan Kabupaten Maros berperan untuk melaksanakan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tamalili Kabupaten Maros yang mana proses pelaksanaan adalah sebagai berikut :

Perencanaan merupakan hal penting dan pertama yang harus dilakukan sebelum bertindak sehingga perencanaan dapat memberi arah kegiatan agar lebih dapat dikontrol dan dijamin keberhasilannya.

Koordinasi pengawasan yang dilakukan terhadap pembangunan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros didasarkan pada program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah disusun sebelumnya, sekaligus tugas pengawasan yang meliputi :

a. Pengumpulan informasi, mengenai obyek yang akan diawasi merupakan perspektif yang sangat di butuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan, informasi yang dimaksudkan tempat dan obyekttf adanya.

b. Penelaahan Peraturan, hal ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang wewenang yang mendasari pelaksanaan pembangunan yang diawasi, serta untuk mengembangkan langkah-langkah koordinasi pengawasan dan menentukan ketataan obyek yang akan diawasi terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan prosedur kerja pembangunan.

- c. Penyusunan Program, dalam rangka penyusunan program kerja Koordinasi Pengawasan Tahunan (PKPT) setiap menjelang akhir tahun anggaran, perwakilan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) senantiasa melakukan koordinasi dengan aparat pengawas fungsional untuk membahas penyusunan usul program kerja pengawasan tahunan untuk tahun yang akan datang.
- Untuk setiap pemerintahan yang dilakukan pembangunan di Kecamatan Tamralli Kabupaten Maros, terlebih dahulu di susun program kerja pengawasan yang merupakan rencana tentang langkah-langkah yang harus dilakukan selama kegiatan pengawasan yang dalam hal ini dilakukan oleh ketua tim dan disetujui oleh camat Tamralli. Program kerja koordinasi pengawasan berfungsi sebagai berikut :
1. Rencana yang sistematis pada setiap tahap kegiatan.
 2. Landasan pemberian tugas dari tanggung jawab pengawasan.
 3. Alat pembanding bagi pengawas antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah ditentukan.

Berikut ini pendapat responden tentang kemampuan aparat perencanaan koordinasi pengawasan menyusun rencana kerja.

Tabel 1. Pendapat Responden tentang Kemampuan Aparat di dalam Menyusun Rencana Kerja Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Tarrailli.

Klasifikasi	Frekwensi	Prosentase
Sangat Mampu	7	31,8
Mampu	12	54,5
Kurang Mampu	3	13,7
Tidak Mampu	22	100

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2001

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 54,5% menyatakan aparat pengawasan mampu menyusun rencana kerja pengawasan, 31,8% menyatakan sangat mampu dan 13,7% menyatakan kurang mampu. Dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa aparat pengawasan mampu menyusun rencana kerja pengawasan, hal ini disebabkan oleh tersedianya informasi tentang pembangunan yang sedang diawasi serta didukung oleh kemampuan teknis yang dimiliki oleh aparat pengawasan

2. Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan

Dengan memperhatikan rencana kerja Koordinasi pengawasan pembangunan, maka pelaksanaannya meliputi :

- a. Kegiatan pendahuluan, didalam kegiatan pendahuluan, setelah objek sasaran Koordinasi pengawasan ditentukan oleh Kepala Kecamatan selanjutnya membentuk tim pengawas penanggung jawab pengawasan pembangunan.

Pada pengawasan pembangunan di Kecamatan Tarrailli dibentuk tim pengawas terpadu yang terdiri dari pengawas pembantu dari beberapa bidang. Penyusunan tim pengawas terpadu tersebut dimaksudkan agar pengawasan terhadap pembangunan dengan sasaran yang sama akan dapat dilakukan dengan tepat waktunya. Pengawasan terpadu ini memungkinkan secara serentak pada waktu bersamaan oleh beberapa tim pengawas. Berikut tanggapan responden tentang keberadaan tim terpadu di lingkungan Kantor Kecamatan Tarrailli Kabupaten Maros.

b. Peningkatan fisik, kelokasi obyek pembangunan akan meningkatkan dan menyempurnakan pengertian mengenai permasalahan yang ada dalam program kegiatan yang akan diawasi dan juga akan dapat dilihat indikasi ketidak efisienan dan ketidak efektifan dalam pelaksanaan pembangunan.

Kabupaten Maros.
 program, kerja pengawas tahunan di Kecamatan Tanralli terpadu sangat baik dalam rangka menunjang pelaksanaan dipahami bahwa keberadaan tim koordinasi pengawas menyatakan kurang baik. Dari hasil penelitian tersebut dapat menyatakan sangat baik, 40,9% menyatakan baik dan 13,6 % Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 45,4%

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2001

Klasifikasi	Frekwensi	Prosentase
Sangat Baik	10	45,4
Baik	9	40,9
Kurang Baik	3	13,6
Tidak Baik	-	-
Jumlah	22	100

Tabel 2. Pendapat Responden tentang Keberadaan Tim Pengawas Terpadu dari Kecamatan Tanralli

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2001

Klasifikasi	Frekwensi	Prosentase
1 - 2 kali	9	40,9
3 - 4 kali	7	31,8
5 - 6 kali	4	18,1
lebih dari 6 kali	2	9,2
Jumlah	22	100

Tabel 3. Pendapat Responden Terhadap Kehadiran Aparat Pengawasan di Lokasi Proyek Pembangunan di Kecamatan Tanrahi

tabel berikut ini :

dengan rencana. Kehadiran aparat pengawas dapat dilihat pada perbaikan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai didapat dan lebih mudah memberikan peringatan atau tindakan akan membuka kemungkinan lebih besarnya temuan yang akan Hadirnya pengawasan di lokasi proyek pembangunan standar mutu yang telah ditetapkan.

keberhasilan pelaksanaan pembangunan dalam hal memenuhi pengawasan merupakan salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan program pembangunan. Frekwensi kunjungan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Maros terhadap aparat pengawasan wujud pengawasan langsung Dalam peninjauan fisik secara langsung ini, kehadiran

Dari tabel tersebut diatas dapat diperoleh gambaran

bahwa 40,0% menilai kehadiran aparat pengawasan 1-2 kali, 31,8% menilai kehadiran aparat pengawasan 3-4 kali, 18,1% menilai kehadiran aparat pengawasan 5-6 kali dan 9,2% menilai kehadiran aparat pengawasan lebih dari 6 kali. Dari hasil penelitian membuktikan bahwa kehadiran aparat pengawasan kelokasi proyek pembangunan masih kurang, hal ini disebabkan karena faktor fasilitas berupa kendaraan menjangkau lokasi proyek pembangunan masih kurang.

c. Temuan dan Pengembangannya, adalah merupakan setiap fakta terutama yang menyangkut kesalahan atau penyelenggaraan sebagai hasil koordinasi pengawasan harus dikembangkan untuk dijadikan landasan dalam menyusun laporan. Temuan yang diperoleh dievaluasi dan dianalisis kemudian dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan dengan kondisi tersebut akan nampak laporan hasil koordinasi pengawasan.

Dengan mengembangkan temuan tersebut dapat dikatakan kondisi yang sebenarnya, berupa penyimpangan atau penyelengaan dalam hal ini dituntut kemampuan aparat

Sebagai seorang pengawas seyogyanya memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang dapat diteladani, adapun sifat-sifat kepemimpinan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Dari tabel tersebut diatas dapat diperoleh gambaran bahwa 50% menyatakan aparat inspektorat mampu mendapat temuan, 36,3% menyatakan aparat inspektorat sangat mampu mendapat temuan, 13,7% menyatakan aparat inspektorat kurang mampu. Dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa sudah cukup memadai.

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2001

Klasifikasi	Frekwensi	Prosentase
Sangat mampu	8	36,3
Mampu	11	50,0
Kurang mampu	3	13,7
Tidak Mampu	-	-
Jumlah	22	100

Tabel 4. Pendapat Responden Terhadap temuan aparat inspektorat dalam suatu proyek pembangunan.

proyek pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

pengawasan dalam menilai dan menganalisa fakta secara spesifik. Berikut ini pendapat responden terhadap kemampuan aparat Inspektorat Kabupaten terhadap temuan di dalam suatu

b. Uraian hasil pengawasan, temuan positif yang disajikan sebagai pernyataan yang berisi prestasi keberhasilan, tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan, tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan oleh aparat pengawasan, sedangkan temuan

a. Ringkasan hasil pengawasan, merupakan uraian umum yang menyajikan hal penting secara jelas, teliti dan wajar yang bersumber dari data yang ada dalam uraian hasil koordinasi pengawasan.

Pelaporan merupakan rangkaian kegiatan dalam tugas pengawasan yang mana laporan hasil koordinasi pengawasan merupakan sarana komunikasi resmi untuk menyampaikan kepada pejabat yang berwenang melaksanakan koordinasi pengawasan di Kecamatan Tanralilli Kabupaten Maros. Adapun isi laporan hasil pengawasan tersebut terdiri dari :

3. Pelaporan Hasil Pengawasan
 - a. Jujur
 - b. Berpengertian
 - c. Mampu mengambil keputusan
 - d. Tegas
 - e. Menjadi tauladan

- negatif memuat tentang kesalahan atau penyelesaian diraitkan secara berturut berdasar ciri temuan.
- Penyampaian laporan berupa hasil pengawasan disampaikan dengan nota dinas kepada Camat Tanralili yang berisi petunjuk perbaikan yang bernilai strategis dari hasil pengawasan. Kemudian oleh Camat disampaikan kepada pimpinan satuan kerja dalam lingkungan Kantor Kecamatan Tanralili.
- Tembusan laporan hasil pengawasan Kecamatan Tanralili disampaikan kepada :
- Inspektorat Kabupaten Maros
 - Sekretaris wilayah kabupaten Maros
 - Kepala desa/keurahan dalam wilayah Kecamatan Tanralili dimana proyek tersebut dibangun.
 - Satuan kerja yang diperiksa.
4. Perumusan saran dan Pengambilan Tindakan Korektif.
- Perumusan saran dan pengambilan tindakan korektif merupakan fase terakhir dari keseluruhan rangkaian kegiatan mekanisme koordinasi pengawasan pembangunan di wilayah Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.

Demikianlah serangkaian kegiatan mekanisme koordinasi pengawasan pembangunan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros yang pada hakikatnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan,

penyimpangan dan penyelewengan yang terjadi. tindakan korektif berupa denda atau jatuh sanksi atas pantas dibanggakan. Oleh karena itu perlunya pengambilan kita sepatutnya bahwa citra pengawasan belum sampai pada tingkat yang meningkatkan wibawa pengawasan, yang mana sekarang ini mungkin Pengambilan tindakan korektif juga berpengaruh pada usaha yang memang harus dibetulkan.

negatif dalam hal ini penyimpangan atau penyelewengan mendasar pengawasan, pengambilan tindakan korektif ditujukan bagi temuan pengawasan sangat dibutuhkan dalam upaya meningkatkan fungsi Pengambilan tindakan korektif sebagai tindak lanjut terungkap dalam uraian hasil pengawasan. merupakan prestasi keberhasilan oleh aparat pengawasan sebagai pada saat melakukan kunjungan kelokasi pembangunan, yang mana pengawasan senantiasa memberikan pengertian dan pengarahan koordinasi pengawasan dalam pengertian bahwa aparat kumusan saran biasanya melekat pada kegiatan pelaksanaan

B. Realisasi Koordinasi Pengawasan Pembangunan

Kabupaten maros sudah berjalan sebagaimana mestinya. Bantuan pembangunan Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros bersumber dari dana APBD, Bantuan pembangunan, Impres pembangunan merupakan bantuan langsung kepada Kecamatan Tanralili atas beban APBD untuk pembangunan.

Dana pembangunan tahun anggaran 1999/2000 di Kecamatan Tanralili sebesar Rp. 4.085.501.000 yang keseluruhannya digunakan untuk pembangunan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan untuk menghabiskan anggaran pada setiap akhir tahun anggaran. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini .

Tabel 5. Realisasi dana pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tanrahi Kabupaten Maros

No	Program dan Proyek	Anggaran Pokok (Rp)	Kemajuan dana (%)	Kemajuan Fisik (%)
1.	Pembangunan Kanal di Desa Puncak	5.000.000	100	100
2.	Proyek kanalisasi	120.000.000	100	100
3.	Proyek peningkatan jalan dan jembatan	2.024.091.000	100	100
4.	Proyek bantuan pedesaan	60.000.000	100	75
5.	Pembangunan desa tertinggal	124.118.000	100	100
6.	Bantuan pembangunan rehabilitasi (SI)	239.608.000	100	100
7.	Pembangunan gedung SID	364.280.000	100	100
8.	Pembangunan sarana kesehatan	70.000.000	100	75
9.	Penyediaan perumahan dan pemukiman	57.000.000	75	75
10.	Pemb. Saran fisik pemerintahan	58.749.000	100	75
11.	Bantuan pembangunan kantor desa/kelurahan	48.000.000	100	100

Sumber : Kantor Kecamatan Tanrahi Tahun 2001

Klasifikasi	Frekwensi	Prosentase
Sangat Berhasil	6	27,3
Berhasil	11	50,0
Kurang Berhasil	3	13,6
Tidak Berhasil	2	9,10
Jumlah	22	100

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2001

pelaksanaan pembangunan meliputi berbagai macam proyek pembangunan yang diprogram oleh pemerintah Kecamatan Tarralli dinilai berhasil jika pelaksanaan pembangunan tersebut mencerminkan beberapa indikator seperti :

- Ketepatan waktu penyelesaian pembangunan
- Kesesuaian pelaksanaan dengan rencana yang ditetapkan.
- Pemanfaatan dari proyek pembangunan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.

Indikator tersebut dapat diketahui melalui penilaian aparat pemerintah yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Sejahtera mana tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan berikut ini responden terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6
Pendapat Responden Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Tarralli

Mengawas merupakan suatu pekerjaan yang sangat sensitif sifatnya karena yang diawasi adalah manusia. Oleh karena itu pengawas dituntut memiliki kemampuan yang optimal baik dari segi pengetahuan, keterampilan, moral, maupun akhlak.

1. Kemampuan Aparat pembangunan

4.3.1 Faktor yang mendukung Pelaksanaan koordinasi pengawas Pengawasan Pembangunan

C. Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Koordinasi

rekanan.
 proyek tentang modal kerja. Organisasi dan ahli yang memiliki pelaksana pembangunan memperhatikan rekanan atau pelaksanaan aparat pelaksana pembangunan disebabkan oleh karena aparat proyek pembangunan sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Menurut pelaksanaan pembangunan sudah berhasil terutama dari penyelesaian berhasil. Dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa menyatakan pelaksanaan pembangunan kurang berhasil, dan 9,10 tidak menyatakan pelaksanaan pembangunan sangat berhasil, 13,6% 50% menyatakan pelaksanaan pembangunan berhasil, 27,3% Dari tabel tersebut diatas dapat diperoleh gambaran bahwa

Aparat pengawas harus memiliki pengetahuan yang luas tentang hal yang diawasi, juga harus memiliki wawasan berteknologi yang luas dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaan. Seperti kita maklumi bahwa kegiatan koordinasi pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan, maka jika pengawas mampu menemukan adanya suatu kesalahan atau penyimpangan secepatnya harus diatasi. Kemampuan untuk mencegah dan melaporkan kesalahan atau penyimpangan yang terjadi membutuhkan kecakapan dari aparat pengawasan yang senantiasa harus melekat pada dirinya pada saat melaksanakan pengawasan yang dimiliki oleh aparat pengawas yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan akhlak tergantung dari pada tingkat pendidikan aparat pengawas, semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka kemampuan yang dimiliki akan lebih demikian pula sebaliknya. Berikut pendapat responden terhadap kemampuan aparat pengawas pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Inspektorat Kabupaten Maros selaku instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan bekerja diharapkan.

Dalam organisasi yang kompleks setiap bagian harus bekerja secara terkoordinir agar masing-masing mendapatkan hasil yang

2. Koordinasi antar aparat pengawasan

baik

Dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa kemampuan aparat pengawasan pembangunan yang meliputi kemampuan pengetahuan, keterampilan dan akhlak sudah dapat dikatakan menyatakan kurang mampu dan 4,5 % menyatakan tidak mampu. 59,1% menyatakan mampu, 27,7% menyatakan tidak mampu, 9,1% Dari tabel tersebut diatas dapat diperoleh gambaran bahwa

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2001

Klasifikasi	Frekwensi	Prosentase
Sangat mampu	6	27,7
Mampu	13	59,1
Kurang mampu	2	9,1
Tidak Mampu	1	4,5
Jumlah	22	100

Tabel 7. Pendapat Responden Terhadap Kemampuan Aparat Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Tarralli

Sumber : Diolah dari data Primer Tahun 2001

Klasifikasi	Frekwensi	Prosentase
Selalu bekerjasama	8	36,4
Seringkali bekerjasama	10	45,5
Jarang bekerjasama	3	13,6
tidak pernah bekerjasama	2	9,1
Jumlah	22	100

Tabel 8. Hubungan Kerja sama Antar Aparat Pengawas dalam pelaksanaan Tugas Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Tanralli

pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

terlibat. Berikut hubungan kerja sama antar aparat pengawasan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang Untuk keberhasilan pengawasan pembangunan, maka harus pembangunan.

mempertuhkan, disain proyek sebagai standar pengawasan dengan mempertuhkan volume pekerjaan, waktu dengan penting terutama dalam menilai dan memeriksa pengelolaan dana kegiatan pengawasan pembangunan mempunyai arti yang sangat pengawasan pembangunan. Keterlibatan aparat pengawas dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terlibat dalam sama dengan camat dan aparatnya mempunyai tugas

Adapun dana yang dibutuhkan tersebut bersumber dari dana operasional tahunan yang telah diprioritaskan setiap tahun anggaran untuk kepentingan pengawasan. Dana operasional pengawasan sangat mendorong pelaksanaan pengawasan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan dari aparat pengawasan yang harus

pengawas yang turun pada saat itu.

volume kerja, jarak lokasi proyek dan berapa banyak tenaga dengan kebutuhan yang diperlukan dengan memperhatikan langsung, oleh karena itu harus diberi tunjangan perjalan sesuai aparat pengawasan di lokasi proyek sebagai wujud pengawasan kepadanya selaku aparat pengawasan fungsional. Kehadiran Kecamatan Tanrahi merupakan tugas yang diembankan Pelaksanaan koordinasi pengawasan atas pembangunan di

3. Dana Operasional Setiap Tahun

dengan baik.

dan kerjasama antar aparat pembangunan sudah dilaksanakan Dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa koordinasi bekerjasama, dan 9,1% menyatakan tidak pernah bekerjasama. 36,4% menyatakan selalu bekerjasama, 13,6% menyatakan jarang Dari tabel tersebut diatas dapat diperoleh gambaran bahwa

Dari tabel tersebut diatas dapat diperoleh gambaran bahwa 54,5% menyatakan pengawasan sangat mendorong, 40,9% menyatakan mendorong, dan 4,5% menyatakan kurang mendorong. Dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa dana operasional pengawasan sangat mendorong pelaksanaan dana operasional pengawasan pembangunan. Hal ini disebabkan karena dana operasional tersebut berkenan dengan pemenuhan kebutuhan aparat pengawasan pada saat melaksanakan koordinasi pengawasan.

Sumber : Diolah dari data Primer Tahun 2001

Klasifikasi	Frekwensi	Prosentase
Sangat Mendorong	12	54,5
Mendorong	9	40,9
Kurang Mendorong	1	4,5
Jumlah	22	100

Tabel 9. Pendapat Responden Terhadap Dana Operasional Tahunan Dalam Menjangkau Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Tarrauli.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. jawab akan keberhasilan pelaksanaan pengawasan dijunjung dipenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan maka rasa tanggung

Sumber : Diolah dari data Primer Tahun 2001

Klasifikasi	Frekwensi	Prosentase
Sangat Memadai	6	10,9
Memadai	8	36,4
Kurang Memadai	8	36,4
Tidak Memadai	-	-
Jumlah	22	100

Tabel 10. Pendapat Responden Terhadap Penyediaan Fasilitas Pengawasan Pembangunan di Kecamatan Tanralili berikut ini.

responden terhadap penyediaan fasilitas pengawasan pembangunan di Kecamatan Tanralili dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dari hasil penjelasan diatas menunjukkan bahwa tersedianya

kendaraan bermotor dan sebagainya harus tersedia. terjadinya kesalahan atau penyimpangan, untuk fasilitas berupa pengawasan di lokasi proyek pembangunan dapat mencegah diburuhkan fasilitas, seperti kita pahami bahwa kehadiran aparat pengawasan untuk menjangkau lokasi proyek pembangunan Dalam rangka pelaksanaan Koordinasi pengawasan aparat

1. Kurang Fasilitas Koordinasi Pengawasan
4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan

Indakan manipulasi dan sebagainya oleh pihak yang diawasi merupakan sinyal tentang masih adanya objek yang diawasi belum memahami arti dan manfaat dari hasil koordinasi pengawasan. Koordinasi pengawasan dilakukan sebenarnya bukan untuk mencari kesalahan tetapi bagaimana caranya

pengawasan yang dilaksanakan di Kecamatan Tanralili yang didasarkan atas program kerja pengawasan tahunan memungkinkan obyek yang diawasi dalam hal ini pembangunan berusaha untuk memperbaiki segala hal terutama dari segi administrasi sehingga tidak nampak adanya kesalahan atau penyimpangan.

2. Kurang Kesadaran akan manfaat hasil koordinasi pengawasan pembangunan berupa sepeda motor kurang memadai. Dari tabel diatas dapat diperoleh gambaran bahwa 36,4% menyatakan pelaksanaan koordinasi pengawasan menyatakan sangat memadai. Dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa penyediaan fasilitas pelaksanaan pengawasan pembangunan berupa sepeda motor kurang memadai, 36,4% menyatakan kurang memadai, dan 10,9% menyatakan akan manfaat hasil koordinasi pengawasan pembangunan.

Dari tabel tersebut diatas dapat diperoleh gambaran bahwa kurang kesadaran akan manfaat hasil koordinasi pengawasan menghambat pelaksanaan koordinasi pengawasan seperti terlihat

Sumber : Diolah dari data Primer Tahun 2001

Klasifikasi	Frekwensi	Prosentase
Sangat menghambat	5	22,7
menghambat	14	63,6
Kurang menghambat	3	13,6
Tidak menghambat	-	-
Jumlah	22	100

Tabel 11. Pendapat Responden Terhadap Kurangnya Kesadaran pihak yang diawasi akan manfaat hasil pengawasan pembagian di Kecamatan Tanralili.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Kurangnya kesadaran pihak yang diawasi manfaat hasil koordinasi pengawasan dirasakan sebagai faktor penghambat. Kesalahan atau penyimpangan harus dilaporkan, tanpa kesadaran akan hasil pelaksanaan koordinasi pengawasan kesalahan dan penyimpangan akan harus terjadi.

tujuan yang telah direncanakan, maka informasi yang menyangkut kesalahan atau penyimpangan harus dilaporkan, tanpa kesadaran akan hasil pelaksanaan koordinasi pengawasan kesalahan dan penyimpangan akan harus terjadi.

memperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu dalam mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan

berikut ini.

pengawasan koordinasi pengawas dapat dilihat pada tabel pendapat responden terhadap target pembuatan laporan hasil pembangunan berjalan tidak sesuai dengan rencana. Berikut tanpa diatasi dan diperbaiki, akibatnya pelaksanaan Karena penyimpangan atau kesalahan akan terus berlangsung. LHP akan menghambat keberhasilan pelaksanaan pembangunan. penting dalam penyusunan tindak lanjut koordinasi pengawasan. Dari uraian tersebut diatas kita pahami bahwa LHP sangat dan kebijaksanaan.

sangat besar manfaatnya terutama dalam pengambilan keputusan diadakan pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang. LHP laporan hasil Pengawasan (LHP) harus disampaikan setelah

3. Target Pembuatan LHP sering terlambat

pengawasan pembangunan di Kecamatan Tamali. merupakan salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan koordinasi kesadaran pihak yang diawasi akan manfaat hasil pengawasan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa kurangnya menghambat dan 13,6% mengatakan kurang menghambat. Dari 63,6% menyatakan menghambat, 22,7% menyatakan sangat

Tabel 12. Pendapat Responden Terhadap target pembuatan LHP dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Panralih

Klasifikasi	Frekwensi	Prosentase
Sangat menghambat	7	31,8
menghambat	11	50,0
Kurang menghambat	4	18,1
Tidak menghambat	-	-
Jumlah	22	100

Sumber : Diolah dari data Primer Tahun 2001

Dari tabel tersebut diatas dapat diperoleh gambaran bahwa yang menyatakan keterlambatan LHP menghambat 50,0% yang sangat menghambat 31,8% dan 18,1% yang menyatakan kurang menghambat. Dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa keterlambatan pembuatan LHP merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan pembangunan, dengan asumsi bahwa kesalahan dan penyimpangan akan terus berlanjut karena landasan untuk mengadakan tindakan pembangunan berjalan tidak sesuai rencana.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut diatas, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme koordinasi pengawasan pembangunan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros meliputi serangkaian kegiatan pokok yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil pengawasan dan perumusan saran dan tindakan korektif.

2. Kealisan koordinasi pengawasan pembangunan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.

Kealisan koordinasi pengawasan pembangunan di Kecamatan Tanralili telah berhasil dicapai dengan baik berkat adanya kerjasama yang baik diantara pengawas di samping itu penggunaan anggaran dapat dianggarkan sesuai dengan anggaran yang ada.

3. Faktor yang mendukung pelaksanaan koordinasi pengawasan pembangunan di Kecamatan Tanralili adalah sebagai berikut :

- a. Kemampuan Aparat
- b. Koordinasi antar aparat
- c. Dana operasional setiap tahun

P E N U T U P

B A B V

4. Faktor Penghambat pelaksanaan koordinasi pengawasan yaitu :

- a. Kurangnya fasilitas koordinasi pengawasan
- b. Kurangnya kesadaran akan manfaat hasil koordinasi pengawasan pembangunan
- c. Target pembuatan LPH sering terlambat

B. Saran-Saran

1. Aparat pemerintah yang terlibat dalam pelaksanaan tugas koordinasi pengawasan pembangunan di sarankan hendaknya memiliki kemampuan inspektif agar para pelaksana proyek pembangunan merasa diinspekti sehingga nampak dan dapat ditunjukkan kelemahan-kelemahan atau ketidaksesuaian pelaksanaan pembangunan dengan aturan yang ada.

2. Hendaknya faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan koordinasi pengawasan pembangunan diperhatikan dan dikembangkan demi kelancaran pelaksanaan koordinasi pengawasan sehingga terbinanya aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa, berhasil guna dan berdayaguna dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Perlu diadakan penelitian lanjutan untuk mengkaji lebih mendalam tentang mekanisme koordinasi pengawasan pembangunan di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- CST.Kansil, 1990. Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Landayaningrat Soewarno, 1981. Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta.
- Hasbuan S.P. 1994. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Gunung Agung, Jakarta
- Manullang, M. 1985. Dasar-dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prajudi S. 1989. Dasar-Dasar Ilmu Administrasi, balai Iktar, Jakarta.
- Siagian, S.P. 1994. Efisiat Administrasi, Haji Masagung, Jakarta.
- Soejatmo, 1990. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soejatmo, 1998. Beberapa Pengertian Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Susiladereca, d. 1996. Dasar-Dasar Kebijakanaksanaan Keuangan Negara, Bina Aksara, Jakarta.
- Terry R. George, 1990. Dasar-Dasar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta.
- The Liang Cie, 1993. Administrasi Perkantoran Modern, Nur Cahya, Yogyakarta.
- Tjokromidjojo Bintoro, 1985. Pengantar Administrasi Pembangunan, Kajawali Press, Jakarta.
- Tjokromidjojo Bintoro, 1990. Pengawasan Keuangan Negara, Kajawali Press, Jakarta.